

BUPATI LOMBOK TIMUR MENERIMA HASIL PENILAIAN KEPATUHAN OMBUDSMAN

Kamis, 28 Februari 2019 - Khairul Natanagara

Selong - Ombudsman RI Perwakilan NTB menyerahkan hasil penelitian kepatuhan kementerian/lembaga/pemerintah daerah Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur kepada Bupati Lombok Timur H. M. Sulis. Kepatuhan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim, di Kantor Bupati

Didampingi oleh Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar menjelaskan kepada Bupati bahwa penilaian tersebut sengaja dilakukan pada tahun 2009 agar tidak terjadi korupsi, juga untuk memastikan kepatuhan Organisasai Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. "Kita memberikan akses yang terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai standar pelayanan seusai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Dalam penilaian kepatuhan 2018 Kabupaten Lombok Timur pada penilaian kepatuhan 2018 berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang", papar adhar. "Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Rohman Farly yang ikut mendampingi Bupati saat pertemuan tersebut menyatakan bahwa jika ada perbaikan yang dilakukan pada penilaian 2019 menjadi zona hijau atau kepatuhan tinggi," Ombudsman NTB akan siap bergandengan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar pada penilaian 2019 bisa berada pada zona hijau", terang Adhar.

Menanggapi hasil penilaian Ombudsman tersebut, Sukiman Azmy menyatakan akan mempelajari hasil penilaian kepatuhan Ombudsman dan indikator penilaianya. Ia juga menyatakan memiliki komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik di kabupaten yang dipimpinnya berdasarkan hasil penilaian Ombudsman. Sukiman mengakui di beberapa layanan perlu dilakukan perbaikan, salah satunya pada layanan administrasi kependudukan (adminduk). Menurutnya layanan adminduk masih mengalami kendala setelah layanannya mulai dilimpahkan pada tingkat Kecamatan. Namun pada tahun 2019, Sukiman berkomitmen untuk membenahi layanan publik salah satunya memperkuat layanan adminduk di tingkat kecamatan, "kendala teknis seperti sinyal yang sulit di kecamatan tertentu akan kami coba selesaikan di tahun ini," jelasnya.

Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten yang menjadi obyek penilaian kepatuhan di Provinsi NTB. Dalam penilaian kepatuhan Lombok Timur mendapatkan skor 58,22 atau urutan 127 dari 199 kabupaten di Indonesia.